

**EVALUASI KETAATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGKA DALAM MENGELOLA BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016**



Skripsi oleh

Vera Susanti

01031181419028

Akuntansi

Diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
EVALUASI KETAATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGKA DALAM MENGELOLA BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016

Disusun oleh :

Nama : Vera Susanti

NIM : 01031181419028

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 April 2018

Ketua :  _____

Abukosim, S.E., M.M., Ak

NIP. 1962 0507 199512 1 001

Tanggal : 24 April 2018

Anggota :  _____

Hj. Rela Sari, SE., M.Si., Ak

NIP. 1972 0606 200003 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EVALUASI KETAATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGKA DALAM MENGELOLA BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016**

Disusun oleh :

Nama : Vera Susanti
Nim : 01031181419028
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang kajian : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 28 Mei 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 28 Mei 2018

Ketua



Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP. 1962 0507 199512 1 001

Anggota



Reta Sari, SE., M.Si., Ak
NIP. 1972 0606 200003 2 001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 1973 0317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Vera Susanti
NIM : 01031181419028
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Dalam
Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan
PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016**

Pembimbing :

Ketua : Abukosim, S.E., M.M., Ak
Anggota : Hj. Reli Sari, SE., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 28 Mei 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 28 Mei 2018
Penulis Pernyataan



Vera Susanti
NIM. 01031181419028

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Vera Susanti
NIM : 01031181419028
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 28 Mei 2018

Pembimbing Skripsi,

Ketua


Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP. 1962 0507 199512 1 001

Anggota,


H. Rela Sari, S.E., M.Si., Ak
NIP.1972 0606 200003 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP 1973 0317 199703 1 002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”

(QS. Al Insyirah: 6-8)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(QS. Al-Ankabut: 6)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah sesuai dengan Permendagri nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD. Adapun skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian. Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila ada isi dari skripsi ini yang kurang berkenan atau apabila terdapat kesalahan. Penulis juga mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca sekalian, agar di kemudian hari penulis dapat menyajikan yang lebih baik lagi. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembaca pada umumnya, dan penulis pada khususnya.

Indralaya, Mei 2018

Penulis,



Vera Susanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Batuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan akal pikiran dan keluasan hati sehingga penulis selalu memberikan karya terbaik bagi diri penulis maupun orang lain.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si, Ak., CA sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abukosim, S.E., M.M., Ak sebagai Ketua Pembimbing Skripsi dan Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak Sebagai Anggota Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Para dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran.
8. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan bagian tata usaha, dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam semua proses yang diperlukan.
10. Orang tuaku tercinta Bapak Yawaharlal S.E dan Ibu Aslianah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan kasih sayangnya yang tak terhingga
11. Abang-abangku tersayang Dedy Furmansyah, Firliansyah, dan Doni Nopriansyah yang sudah menjadi saudara yang telah memberikan dukungan moril dan material selama ini
12. Keponakan ku tersayang Khalifah Zhafirah dan Muhammad Fadil Arroyan semoga kalian menjadi anak yang shaleh dan shaleha dan menjadi kebanggaan keluarga yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.

13. *My best partner* Mat Hasim, terima kasih selama perkuliahan ini sudah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis, telah banyak member motivasi, dukungan dan doa-doanya selama ini/
14. Bapak Bupati dan staf-staf pemerintah daerah Kabupaten Bangka. Bapak Rahmani Kepala bagian Adminitrasi Kesra dan Kemasyarakatan dan ibu Kurniawati Abadi Kasubag Keuangan BPKAD atas bantuannya dalam proses pengambilan data sebagai objek dalam penulisan skripsi ini
15. Yuk Atun, tetangga kosan yang telah mendampingi penulis disaat susah maupun senang.
16. Sahabat-sahabat penulis di masa perkuliahan (Sri Rizky, Mardiah, Rezi, Andina, Devi, Riz, Repi, dan Indah) dan teman-teman sebimbangan, baik dengan Pak Abu maupun Ibu Rela (Marini, Lulu, Maha, Roma, dan lainnya). Terima kasih karena sudah menjadi sahabat terbaik penulis, dan membantu perkuliahan penulis selama empat tahun terakhir. Terima kasih atas bantuan tanpa pamrihnya.
17. Teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih sudah menjadi teman selama ini dan penulis percaya suatu hari nanti kita akan sukses bersama-sama.
18. Sahabat penulis, Shafira Emeraldha, Annisa Fadilah Rahman, Desta Parlina, dan Andi Dewi. Semoga kita menjadi pribadi yang sukses dan berhasil meraih cita-cita sesuai harapan.
19. Semua pihak-pihak lain yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua.
Amin

Penulis



Vera Susanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Vera Susanti
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Sekayu/ 13 Oktober 1995
3. Alamat :Jalan Pucuk Merah 1 (Depan Pengadilan Agama) Jalur dua-Pemda, Sungailiat, Bangka
4. Agama : Islam
5. Nama Ayah : Yawaharlal S.E
6. Nama Ibu : Aslianah
7. No HP : 082176451065
8. Email : vera.susanti1187@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. TK : TK Pertiwi Sungailiat Bangka
(2002-2004)
2. SD : SD Negeri 10 Sungailiat Bangka
(2004-2009)
3. SMP : SMP Negeri 2 Sungailiat Bangka
(2009-2011)
4. SMA : SMA Negeri 1 Sungailiat Bangka
(2011-2014)

C. Pendidikan Non Formal

Magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka

D. Pengalaman Organisasi

1. Staff muda Bem KM FE Unsri Kabinet Integrasi (2015-2016)
2. Staff ahli Bem KM FE Unsri Kabinet Soliders (2016-2017)

ABSTRAK

Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016

Oleh:

Vera Susanti, Abukosim, dan Rela Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Namun dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah daerah Kabupaten Bangka adalah: keterbatasan anggaran dan Penerima hibah dan bantuan sosial dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban terdapat keterlambatan/kekurangan.

Kata Kunci: Evaluasi, Ketaatan, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Permendagri Nomor 14 tahun 2016

Ketua



Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP. 1962 0507 199512 1 001

Anggota



Hi/Rela Sari, S.E., M.Si., Ak
NIP.1972 0606 200003 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP 1973 0317 199703 1 002

ABSTRACT

The Evaluation Of Local Government Compliance In The District Of Bangka On Managing Grant And Social Assistance Expenditure Based On PERMENDAGRI Number 14 Year 2016

By:

Vera Susanti, Abukosim, and Rela sari

This study aims to know and evaluate whether District Government of Bangka has been managed grant and social assistance expenditure based on Permendagri number 14 year 2016. This analyze is a descriptive with qualitatice method, describes the whole about managing of grant and social assistance expenditure, starts from budgeting, implementation, administration, reporting, accountability, evaluation, and monitoring.

Based on the results, the conclusion is the process of managing grant and social assistance expenditure in District Government of Bangka has been in compliance with the regulation, Permendagri number 14 year 2016. But on managing grant and social assistance expenditure have many constraints, they are limited budgeting and late posting for reporting an accountability.

Keywords: *evaluation, complience, grant expenditure, social assistance expenditure, Permendagri number 14 year 2016*

Leaderf



Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP. 196205071995121001

Assistant,



H. Rela Sari, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197206062000032001

Ascertain,

the head od accounting department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP 1973 0317 199703 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Agensi.....	13
2.2 Belanja Daerah.....	15
2.2.1 Belanja Hibah.....	18
2.2.2 Belanja Bantuan Sosial.....	24
2.2.3 Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.....	29
2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Jenis Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bangka.....	41
4.1.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bangka.....	41
4.1.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	45
4.1.1.3 Keadaan Alam.....	45
4.1.1.4 Hidrologi.....	46
4.1.1.5 Wilayah Administrasi.....	46

4.1.1.6	Visi dan Misi Kabupaten Bangka.....	48
4.1.1.6.1	Visi Kabupaten Bangka.....	48
4.1.1.6.2	Misi Kabupaten Bangka.....	49
4.1.1.7	Struktur Organisasi.....	49
4.1.1.8	Kondisi Umum Sekretariat Daerah Bagian Adminstrasi Kesra dan Kemasyarakatan.....	52
4.1.1.9	Kondisi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).....	53
4.2	Pembahasan.....	53
4.2.1	Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.....	53
4.2.2	Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.....	67
4.2.3	Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.....	90
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	92
5.2	Saran.....	93
	 DAFTAR PUSTAKA.....	 95
	LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Kelurahan di Kabupaten Bangka Tahun 2017.....	46
Tabel 4.2	Analisis Pengelolaan Belanja Hibah Menurut Permendagri dan Pengelolaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.....	68
Tabel 4.3	Analisis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Menurut Permendagri dan Pengelolaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 2	Daftar Wawancara.....	101
Lampiran 3	Surat Keputusan.....	106
Lampiran 4	Laporan Realisasi Belanja Hibah.....	108
Lampiran 5	Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan atauran pokok yang telah ditetapkan dalam UUD. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*), serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Menurut (Freeman, 2003) dalam (Nordiawan, 2012), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Anggaran sektor publik sangat penting terutama bagi pemerintah karena pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Dan terakhir, untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab kepada masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Untuk memenuhi fungsi tersebut dalam penyusunan anggaran, hendaknya harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat yakni terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan pekerjaan dan jaminan sosial dengan memperkirakan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu anggaran juga dapat dianggap sebagai “alat perjuangan” masyarakat secara kolektif untuk bisa memenuhi kebutuhannya

dan juga sebagai sumber daya agar mampu meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali proses penyusunan dan penetapan anggaran hanya menguntungkan sekelompok elit dan tidak memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keputusan politik untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses pelayanan publik merupakan tujuan utama dari pemerintah, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan demikian pengelolaan keuangan haruslah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam penyediaan pelayanan publik serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah diklasifikasikan

1. Menurut organisasi, belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
2. Menurut fungsi, Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan: diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari:

- Pelayanan umum;
- Ketertiban dan keamanan;
- Ekonomi;

- Lingkungan hidup;
- Perumahan dan fasilitas umum;
- Kesehatan;
- Pariwisata dan budaya;
- Agama;
- Pendidikan; serta
- Perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;
 - d. Bunga;
 - e. Subsidi;
 - f. Hibah;
 - g. Bantuan sosial;
 - h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
 - i. Belanja tidak terduga

Berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2016, Belanja hibah adalah pemberian dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak

berkelanjutan dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang sifatnya tidak berkelanjutan selektif, dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko sosial.

Keberadaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial sebagai salah satu komponen belanja tidak langsung dalam APBD selalu menjadi sorotan publik. Di beberapa daerah di Indonesia belanja hibah dan bantuan sosial rentan dengan penyimpangan. Pengelolaan dana tersebut menjadi kurang transparan dan akuntabel karena pengalokasiannya tidak didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai. Hal ini berbeda dengan belanja langsung terutama belanja modal yang pengelolaannya harus mencapai target kinerja tertentu.

Berlakunya Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016, memberikan petunjuk dan pedoman yang lebih jelas tentang pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Dengan adanya Permendagri ini memberikan pedoman kepada pemerintah terutama pemerintah daerah mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan monitoring, sehingga pengelolaan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari APBD, permasalahan yang terjadi dipemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan hibah dan bantuan sosial adalah:

- a. Ketidakjelasan tentang definisi hibah dan bantuan sosial yang akhirnya berakibat pada kesalahan dalam penganggaran.
- b. Adanya unsur politik dalam penganggaran sehingga jumlah bantuan sosial meningkat menjelang pilkada
- c. Bentuk pertanggungjawaban yang terlalu sederhana dari penerima hibah dan bantuan sosial.

Hasil penyelidikan penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyatakan bahwa banyak terjadi kasus korupsi penyelewengan hibah dan bantuan sosial. Modus operasi penyelewengan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat daerah beragam, seperti adanya LSM fiktif yang dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas selain untuk dijadikan wadah untuk menampung kucuran dana dari bantuan sosial. Masalah lain yang dihadapi dalam hibah dan bantuan sosial adalah terjadinya kesalahan dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial. Terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi akuntansi karena pencatatan dalam proses akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran dan harus dimasukkan dalam pos-pos atau mata anggaran yang terdapat dalam penjabaran APBD. Sedangkan dalam neraca, proses akuntansi mencatat belanja bantuan sosial dapat dilakukan apabila memenuhi definisi asset atau kewajiban

dan dapat diukur secara handal. Kesalahan penganggaran dapat menyebabkan munculnya asset, namun transaksi tersebut dicatat sebagai belanja hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai dengan anggaran.

Penyelewengan dana bantuan sosial juga terjadi di BPKAD Kabupaten Bangka Pada tahun anggaran 2015 terjadi yang dilakukan oleh bendahara BPKAD yang nilainya mencapai Rp 1,9 Miliar.

Penelitian Miftahul Jannah (2013) yang berjudul Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012. Penelitian yang dilakukan Mithahul Janah bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada penelitian penulis hampir sama dengan penelitian Mithahul Janah, tetapi penulis mempersempit masalah yaitu hanya melihat untuk

mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah daerah Kabupaten Bangka telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lokasi penelitian penulis di Kabupaten Bangka, penulis memilih Kabupaten Bangka karena pada tahun anggaran 2015 karena ada penyelewengan belanja bantuan sosial oleh bendahara BPKAD. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka penulis membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung terkait dalam pembuatan penelitian yang membacanya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan, evaluasi, pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat, penulis dan pembaca mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

2. Manfaat praktis

- A. Penulis: penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara mendalam dibidang akuntansi sektor publik khususnya dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan Permedagri nomor 14

tahun 2016 dan Permendagri nomor 32 tahun 2011 dan serta sebagai skripsi.

- B. Bagi peneliti: hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penulisan dibidang yang sama dimasa yg akan datang.
- C. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka: penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan ketatan dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang mencakup regulasi dan tata laksana belanja hibah dan belanja bantuan sosial, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dalam penulisan dan pembahasan pada penelitian ini, diperlukan suatu sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat materi yang akan dibahas. Skripsi ini akan terbagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai dasar pemikiran dalam penelitian ini, mencakup penjelasan tentang latar belakang dilakukan penelitian,

permasalahan yang dibahas dalam penelitian, tujuan diadakan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah serupa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian, meliputi ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai ketaatan Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diperoleh pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tamrin. 2015. *Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. E-Jurnal Katalogis Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 Hlm 114-124: Universitas Tadulako
- Amalia, Citra Rizki Dan Suryo Pratolo. 2013. *Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, Halaman: 1-13: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Darsie, Nurla. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Jannah, Miftahul. 2013. *Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012*. Jurnal Audit Dan Akuntansi Vol. 2, No. 2, Hal. 21-48: Universitas Tanjungpura.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H.. (1976). *Theory To The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. Journal Of Financial Economics, 3 (4), Hal. 305-360
- Lasut, Marsella, Jenny Morasa Dan Lidia M. Mawikere.2017. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai PP No 71 Tahun 2010*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 149-156: Universitas Sam Ratulangi
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Muaja, Leike Refni , Ventje Ilat Dan Jantje J. Tinangon. 2014. *Perlakuan Akuntansi Bantuan Sosial Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado*. Jurnal Emba Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 510-520: Universitas Sam Ratulangi
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba empat

- Prabowo, Erry Dwi. 2016. *Pengaruh Faktor Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia TA 2015*: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol. 16, No. 2, Agustus 2016:97-107
- Rintonga, Irwan Taufik Dan Mansur Iskandar Alam. 2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Sitanggang, Bethesda, Ab Tangdililing Dan Sri Maryuni. 2014. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal: Universitas Tanjungpura Pontianak
- Sriyani. 2014. *Analisis Akuntansi Dan Pelaporan Bantuan Sosial Dan Hibah*. Artikel: Pusdiklat Keuangan Umum
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Afabeta.
- Suranta, Sri Dan Ristian Pangarso. 2016. *Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015*. Jurnal : Universitas Sebelas Maret
- Suryanto, Teguh Dan Nur Handayani. 2015. *Analisis Pengendalian Intern Pencairan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2013*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 3: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya
- Winoto, Agus Hadi.2015. *Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Juni 2015, Vol. 12, No. 1, Hal 75 – 91*: Universitas Sebelas Maret
- Zamzami, Faiz, Mukhlis Dan Annisa Eka Pramesti .2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Zebua, Willman Fogati. *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupatendan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013)*. Jurnal : Universitas Brawijaya

_____ , Buletin Teknis SAP Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

_____ , Buletin Teknis SAP Nomor 13 Tentang Akuntansi Belanja Hibah

_____ , Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

_____ , Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD

[Http://www.Bangka.go.id](http://www.Bangka.go.id)

[Http://Bangka.Tribunnews.Com/2016/07/13/Bendahara-Bansos-Pemkab-Bangka-Diduga-Selewengkan-Rp-19-Miliar](http://Bangka.Tribunnews.Com/2016/07/13/Bendahara-Bansos-Pemkab-Bangka-Diduga-Selewengkan-Rp-19-Miliar)